

Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi dan Revitalisasi Multilateralisme

Dr. A. Irawan J. H

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, irawanaj@unpar.ac.id

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan pada respon salah satu pokok kajian disiplin Hubungan-Internasional, ekonomi politik internasional dalam hal ini, terhadap pandemi Covid-19 sebagai fenomena global yang terjadi tiba-tiba. Beberapa konsep yang digunakan disini adalah globalisasi, hegemon, dan multilateralisme. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa konsep yang seringkali digunakan dalam ekonomi politik internasional tersebut berguna dalam memposisikan pandemic Covid-19, dan sekaligus menekankan arti penting multilateralisme, dalam realitas dunia yang telah menjadi 'global-village'.

Kata kunci: Covid-19, globalisasi, hegemon, multilateralisme.

Sejak awal tahun sampai April 2020 ini tidak ada satu orangpun yang dapat mengabaikan merebaknya Covid-19. Bukan hanya negara yang disibukkan oleh fenomena yang muncul tiba-tiba ini, tapi juga organisasi, pagujuban, bahkan individu. Semula banyak pihak masih dalam tahapan 'denial', menganggap apa yang terjadi di Wuhan hanya bersifat local, dan akan dengan sendirinya menghilang seperti yang terjadi pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun kemudian dunia 'dibangunkan' secara paksa dari ilusinya ketika korban meninggal telah mencapai ribuan. Yang menggundahkan adalah bahwa korban yang amat banyak tersebut berada di berbagai belahan bumi yang jauh dari Tiongkok, di Iran dan Italia misalnya. Amat mencengangkan ketika AS, yang selama ini dipandang sebagai negara paling maju (juga secara teknologi) di atas planet ini, yang seharusnya paling siap menghadapi apapun, mencatat korban meninggal ribuan bahkan kemudian puluhan ribu jiwa. Korban jiwa di AS justru menempati urutan pertama saat ini. Sebagian pihak kemudian bahkan mempertanyakan apakah AS masih layak dipandang sebagai negara super-power mengacu pada kegagalan ini. Mengingat telah menyebarnya pandemi Covid-19 di lebih dari 200 negara didunia, persoalan ini amat layak harus

dipandang sebagai masalah global, bukan masalah satu atau beberapa negara saja.

Perekonomian global saat Covid-19 mewabah tengah ditandai perang dagang antara 2 negara besar, AS dan China. AS memandang pencapaian ekonomi yang dinikmati China didasari praktek perdagangan dan industri yang curang. AS dibawah presiden Donald Trump kemudian menerapkan tarif tinggi pada berbagai produk China, yang kemudian dibalas China. Akibat persetujuan dua negara besar ini perekonomian global melemah, karena permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak menurun. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya melalui negosiasi, namun belum juga berhasil. Dunia pada waktu itu juga dibayangi naiknya harga minyak akibat ketegangan antara AS dan Iran di Teluk Parsi, yang berpotensi mengganggu distribusi atau pasokan minyak dalam proporsi signifikan (ketika tulisan ini disampaikan, April 2020, dunia justru mengalami penurunan harga minyak secara drastis akibat kegagalan lobby Saudi Arabia terhadap Rusia untuk menurunkan jumlah produksi). Tidak kalah penting adalah intensifikasi Revolusi Industri 4.0 yang mendisrupsi perusahaan-perusahaan besar, dan yang menimbulkan ketidak pastian yang tinggi. Indonesia kala itu tengah berupaya keluar dari

'middle-income trap' melalui Omnibus Law, dan persiapan pemindahan ibukota ke Kalimantan. Dalam kondisi seperti inilah Covid-19 muncul di Wuhan, dan menyebar keseluruh dunia. Sekarang untuk sementara agenda-agenda tersebut harus dilupakan, dan semua negara harus berkonsentrasi dulu untuk menghadapi pandemic Covid-19.

Fenomena Covid-19 memicu timbulnya berbagai analisis tentang dampak yang terjadi serta respon yang perlu disiapkan, agar dunia lebih siap dimasa datang untuk menghadapi guncangan serupa di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, dari inisiatif-inisiatif yang bersifat domestik, sampai kerjasama bilateral, namun belum menunjukkan hasil yang berarti. Tulisan ini akan memfokuskan pada respon yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemic global Covid-19, dan berbagai masalah global pada umumnya, dengan sebelumnya memposisikan fenomena pandemic ini dari sudut kajian ekonomi politik internasional sebagai bagian dari kajian Hubungan Internasional.

Ekonomi Politik Internasional dan Globalisasi

Ekonomi politik internasional adalah kajian yang menyorot hubungan ekonomi dan politik, state-market, dalam skala global. Ekonomi politik internasional mempunyai berbagai fokus ¹. Misalnya perdagangan internasional dan investasi luar negeri. Dengan munculnya negara berkembang pasca perang dunia ke-2 bantuan luar negeri masuk menjadi kajiannya. Kemudian

adalah aktivitas pasar kapital, terutama setelah krisis Asia 1997/1998. Konsep lain ekonomi politik internasional adalah Globalisasi. Walaupun sekarang ini konsep globalisasi dipandang agak usang dengan munculnya konsep-konsep lainnya, namun sebenarnya ia justru amat relevan dalam menggambarkan perubahan 'lingkungan' interaksi manusia. Walaupun terdapat berbagai konsep lain dalam ekonomi politik internasional seperti regionalisme ekonomi ², Revolusi Industri 4.0 ³, kemiskinan ⁴, lingkungan ⁵, dan rivalitas negara-negara besar, namun Globalisasi akan menjadi suatu konsep yang akan dibahas secara khusus karena hubungannya yang bersifat langsung dengan fenomena Covid-19.

Banyak akademisi secara khusus membahas globalisasi. Misalnya adalah Joseph Stiglitz ⁶, Mansbach ⁷, dan Hyland Eriksen. Globalisasi menjelaskan tentang perubahan mendasar dari dunia yang tersekat-sekat akibat polarisasi antara kubu komunisme dan liberal, menjadi yang terkoneksi satu sama lain. Halangan politik bagi terkoneksinya pemerintahan dan masyarakat dari berbagai negara dengan mereka yang berasal dari negara lain menjadi amat berkurang setelah Perang Dingin berakhir di awal 1990-an. Faktor lain yang membentuk globalisasi adalah penemuan teknologi baru yang mendukung keterhubungan lintas batas ini. Komputer telah diperkenalkan sebelumnya, namun internet merupakan instrument baru yang mampu menghubungkan satu titik dengan titik lain yang

¹ Robert Gilpin dibantu Jean M. Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, Princeton and New Jersey, 1987, terutama bab 4-6.

² Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, 1961.

³ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Switzerland, 2016.

⁴ Donella H. Meadows, *Seeing the Population Issue Whole*; in David N. Balaam and Michael Veseth (in *Readings in International Political Economy*), Prentice Hall, New Jersey, US, 1996.

⁵ Andrew Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, New York, 2011, bab 16.

⁶ Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, W.W. Norton, New York & London, 2002.

⁷ R. Mansbach dan K.L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, Routledge, London dan New York, 2008, p.744-746. Juga Mark Rupert, *Ideologies of Globalisation: Contending Visions of a New World Order*, Routledge, London and New York, 2000, terutama bab 16.

terpisah ribuan kilometer di dunia ini. Menjamurnya personal computer yang mempunyai fasilitas internet kemudian makin memperkuat keterhubungan ini. Hasilnya adalah munculnya kemampuan milyaran manusia, bukan hanya pemerintahan ataupun organisasi, untuk mengadakan hubungan lintas batas negara tanpa dapat dihambat lagi. Inilah yang senantiasa diusung konsep Globalisasi, yang menurut Hyland Eriksen disebut *interconnectedness*. Perlu disampaikan disini bahwa pembahasan globalisasi pada kesempatan ini terutama mengacu pada referensi Hyland Eriksen⁸. Apabila penemuan teknologi internet berdampak pada terjadinya *interconnectedness*⁹, maka berakhirnya Perang Dingin memungkinkan terjadinya *mobilization* (of people) secara massif.

Disini terlihat bahwa globalisasi telah membawa dunia sebuah kecenderungan dimana manusia-manusia yang hidup di atasnya terkoneksi dalam ide atau pikiran, dimana mobilisasi manusia terjadi secara massif dalam tingkat global, dan dimana hal-hal tersebut terjadi dalam waktu yang amat singkat, sehingga dampaknya akan menyebabkan *vulnerability*. Eriksen juga menyuguhkan konsep *acceleration* yang menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi berlangsung amat cepat. Perubahan ini pada gilirannya menimbulkan *vulnerability*, suatu kerentanan yang timbul akibat ketidak siapan untuk merespons terjadinya perubahan yang berlangsung cepat. *Interconnectedness, Mobilization, Acceleration* yang mengacu pada keterhubungan yang terjadi secara intensif, mobilisasi dalam lingkup global yang terjadi secara massif, dimana perubahan tersebut terjadi

secara amat cepat, sehingga menimbulkan ketidak siapan untuk merespon (*vulnerability*). Merembaknya secara global Covid-19 yang berasal dari Wuhan kehampir semua negara di dunia memperlihatkan dampak globalisasi, yang tidak berhasil diantisipasi dan direspon secara memadai oleh negara-negara, termasuk oleh AS.

Multilateralisme dan Hegemon

Hal lain yang menjadi perhatian kajian ekonomi politik internasional adalah *global economic governance*, penggunaan multilateralisme untuk menangani persoalan-persoalan ekonomi yang mengglobal. Walaupun anarki yang disebabkan kompetisi antar negara yang berdaulat terus terjadi, namun kolaborasi global juga merupakan praksis yang senantiasa ada. Multilateralism sebagai salah satu bentuk kolaborasi global mampu menghasilkan konsensus, walaupun implementasinya seringkali bersifat sukarela.

Multilateralism¹⁰ adalah suatu paham yang direalisasikan dalam bentuk upaya kolektif negara-negara, terkadang juga melibatkan pelaku non state, dalam upaya membentuk kestabilan dalam suatu isu. Contoh dalam bidang ekonomi misalnya WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund), G-20, G-8, dan lainnya. Multilateralisme mencoba membentuk kerjasama global, koordinasi, atau minimal mengupayakan komunikasi antar negara. Multilateralisme ditujukan untuk menangani persoalan berskala global, melalui kerjasama global. Hasilnya akan dinikmati secara kolektif oleh semua negara. Namun dalam multilateralisme, karena anggotanya adalah negara-negara dengan kekuatan atau karakteristik

⁸ Thomas Hyland Eriksen, *Globalization: the Key Concepts*, BERG, New York, 2007, terutama hal. 8-9.

⁹ Walaupun ada berbagai konsepsi yang disampaikan Eriksen tentang globalisasi, tapi penulis memfokuskan hanya pada empat konsepsi: *interconnectedness, mobilization, acceleration*, dan *vulnerability*.

¹⁰ I. William Zartman, Saadia Touval (eds.), *International Cooperation: The Extent and Limit of*

Multilateralism, Cambridge University Press, 2010, terutama hal. 40, 60, 82. Baca juga Amitav Acharya dan Alistair Ian Johnston (eds.), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, 2001, terutama hal. 73, 106, 156.

yang berbeda, pembagian kewajiban tidak bisa dilakukan secara merata. Artinya akan ada negara-negara yang menikmati hasil kolektif dari multilateralisme namun menyumbang hanya sedikit. Mereka seringkali disebut sebagai *free-rider*.

Kindelberger meyakini bahwa *order*, termasuk melalui multilateralisme, dalam dunia yang *anarchy* dapat dicapai melalui peran *the hegemon*¹¹. Negara *hegemon* superior dalam hal militer, politik, dan ekonomi. Negara *hegemon* harus menjalankan ketertiban (yang diartikan sebagai *public goods*), dengan menggunakan superioritas ekonomi dan militernya, diantara negara-negara yang berkompetisi, agar ketertiban (setidaknya dalam bidang ekonomi) dapat terselenggara. Artinya ketertiban di dunia internasional tercapai dalam kondisi adanya kapasitas dominan dari suatu negara. Negara ini dengan kekuatannya harus menciptakan ketertiban, salah satunya melalui multilateralisme, dengan menggunakan kekuatannya. Tanpa adanya hegemon, dunia makin kuat ditanda oleh anarchy.

Terutama sejak berakhirnya Perang Dingin AS menjalankan peran sebagai hegemon, walaupun tidak lepas dari berbagai kritikan terhadap tindakan unilateralismenya. Dalam masa ini AS mendukung berbagai organisasi internasional dan upaya kolektif dalam memelihara *global public-goods*. Isu yang ditangani misalnya konservasi lingkungan, pemberdayaan hak asasi manusia, keamanan global, dan lain sebagainya. Peran ini makin mengemuka dalam kepemimpinan presiden Barack Obama selama 2 periode kepresidenannya. Namun sejak naiknya presiden Donald Trump tahun 2016, AS terlihat mulai meninggalkan peran *hegemon* nya. AS cenderung

memilih tindakan unilateral yang tercermin dari semboyan Donald Trum, MAGA (Make America Great Again). AS fokus pada pencapaian kepentingan-kepentingannya, dan mengabaikan kepentingan dunia secara kolektif. Contoh dalam hal ini adalah peran AS di TPP (Trans Pacific Partnership), didalam kasus nuklir Iran, didalam hubungannya dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization), dan lain sebagainya. Poin yang seringkali digaris bawahi Donald Trump adalah bahwa AS dalam menjalankan peran hegemon diberbagai lembaga multilateral telah menyumbang terlalu besar untuk hasil (bagi AS) yang terlalu sedikit. Donald Trump enggan untuk mengusung peran *hegemon* dalam multilateralisme karena adanya persoalan *free-rider* disamping kurang signifikannya forum ini untuk pencapaian *national-interest* AS.

Dalam konsisi dunia yang ditandai melemahnya multilateralisme yang bertujuan mengatasi masalah global, muncul Covid-19 di Wuhan yang secara cepat berkembang menjadi masalah global. Masalah global sulit diatasi tanpa kerjasama global (multilateralisme). Inilah yang, menurut penulis, melatar belakangi lambatnya keberhasilan dunia mengatasi pandemic Covid-19.

Revitalisasi Multilateralisme

Multilateralisme merupakan pilihan realistik dalam upaya mengatasi pandemic Covid-19 karena beberapa konsiderasi. Pertama arti penting multilateralisme diharapkan makin dirasakan dalam kasus Covid-19, dimana ketiadaan atau lemahnya multilateralisme mengakibatkan tidak dapat teratasinya persoalan global, bukan hanya pandemic tapi persoalan-persoalan global lainnya, dengan efektif. Kedua, dunia telah

Kemudian adalah Chandra Chari; War, Peace and Hegemony in a Globalized World: the Changing Balance of Power in the Twenty-first Century, Routledge, London and New York, 2008, terutama p. 103.

11 Carla Norrlof, America's Global Advantage: US Hegemony and International Cooperation, Cambridge University Press, UK, 2010, bab 1. Juga Robert O. Keohane, After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, New Jersey, 1984, terutama hal 31, 37, 38.

mempunyai pengalaman menjalankan multilateralisme, sehingga bukan sesuatu yang benar-benar baru lagi. Ketiga, multilateralism sekarang dapat menggunakan produk-produk revolusi industri 4.0, terutama *big-data*. Dengan ini data yang terkait dengan suatu persoalan global dapat diperoleh dengan lebih lengkap dan cepat, serta pilihan-pilihan tindakan dapat dengan lebih akurat tersajikan.

Revitalisasi multilateralisme dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan mengadopsi konsep *multilevel governance*¹². Anggota dalam bentuk ini tidak terbatas pada negara tapi dapat berasal dari entitas lain, misalnya NGO, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, individu, dan lainnya. Perwakilan dapat berasal dari berbagai level selain negara. Misalnya provinsi, kota, dan lain sebagainya.

Kedua melalui penyediaan sumber dana yang tetap, terus menerus dalam kondisi ada atau tidak adanya persoalan global yang mendesak. Pentingnya persiapan untuk menghadapi masalah yang belum terjadi seringkali tidak terlihat ketika masalah tersebut tidak timbul, tapi akan amat berarti ketika ia gagal untuk diantisipasi sehingga respon yang semestinya tidak berhasil diberikan. Hal inilah yang seringkali menimbulkan keengganan negara anggota mengeluarkan dana besar secara kontinu. Bila pendanaan dapat dikumpulkan dari berbagai anggota secara lebih merata, maka persoalan *free-rider* dapat dikurangi, dan *hegemon* tidak dapat bersikap terlalu dominan.

Ketiga dengan mendukung peran *hegemon* yang lebih aktif menjaga tersedianya *global public goods*. Hal ini dapat berupa keamanan global, perekonomian global yang lebih stabil, lingkungan global yang lebih terpelihara, terlaksananya hak asasi manusia dalam lingkup

global dan lain sebagainya. Hegemon perlu diberi ruang untuk mencapai *national-interestnya* sehingga perannya dalam menjaga ketersediaan *global public-goods* dapat dilakukannya dengan baik. Bila *national-interest hegemon* tidak terpelihara, kemampuannya untuk menyediakan *public-goods* juga akan berkurang.

Penutup

Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok, sekarang telah menjadi masalah global. Pandemi ini muncul ketika perekonomian global tengah mengalami kontraksi, terutama disebabkan persaingan AS-Tiongkok sebagai dua negara besar. Globalisasi sebagai konsep yang erat terkait dengan ekonomi politik internasional cukup mampu menjelaskan fenomena pandemic global ini. Hal ini dilakukan melalui penggunaan (sub) konsep *interconnectedness*, *mobility*, *acceleration*, dan *vulnerability*. Isu global pandemic Covid-19 dapat diatasi dengan multilateralisme dimana hegemon berperan aktif didalamnya. Ironis bahwa sekarang ini, dimulai dari sekira 4 tahun yang lalu, multilateralisme tengah berada dalam kondisi lemah, karena peran *hegemon* yang menurun. Tulisan ini menggaris bawahi pentingnya untuk mengundang kembali multilateralisme yang diperluas, baik untuk secara spesifik menghadapi bencana global pandemic ini ataupun untuk menangani tantangan-tantangan global masa mendatang.

Dari sudut pandang ekonomi politik internasional, Covid-19 sebagai pandemic global adalah contoh yang amat jelas akan dampak globalisasi. Makin sedikit hal yang benar-benar bersifat domestik, dan makin banyak hal yang berkarakter global. Sebagai permasalahan global, hal ini menuntut respon yang juga bersifat global, dalam bentuk multilateralisme yang diperluas. Multilateralisme merupakan jawaban yang realistic karena didukung oleh tersedianya berbagai faktor,

¹² Teleconference HI-Unpar tanggal 17 April 2020, dalam dialog dengan Apresian Risadi.

walaupun masih terdapat beberapa tantangan, terutama melemahnya peran *hegemon* dalam menyediakan *global public-goods*. Sudah waktunya menghidupkan kembali dan mengintensifkan multilateralism yang melemah sejak 2016. Pandemi global Covid-19 mengingatkan manusia akan pentingnya multilateralisme, dalam masa krisis dan maupun bukan.

Daftar Referensi

Amitav Acharya dan Alistair Ian Johnston (eds.), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, 2001.

Andrew Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, New York, 2011.

Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, 1961.

Carla Norrlof, *America's Global Advantage: US Hegemony and International Cooperation*, Cambridge University Press, UK, 2010.

Chandra Chari; *War, Peace and Hegemony in a Globalized World: the Changing Balance of Power in the Twenty-first Century*, Routledge, London and New York, 2008.

Donella H. Meadow, *Seeing the Population Issue Whole*; in David N. Balaam and Michael Veseth (in *Readings in International Political Economy*), Prentice Hall, New Jersey, US, 1996.

I. William Zartman, Saadia Touval (eds.), *International Cooperation: The Extent and Limit of Multilateralism*, Cambridge University Press, 2010.

Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, W.W. Norton, New York & London, 2002.

Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Switzerland, 2016.

Mark Rupert, *Ideologies of Globalisation: Contending Visions of a New World Order*, Routledge, London and New York, 2000.

R. Mansbach dan K.L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, Routledge, London dan New York, 2008.

Robert O. Keohane, *After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, New Jersey, 1984.

Robert Gilpin dibantu Jean M. Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, Princeton and New Jersey, 1987.

Thomas Hylland Eriksen, *Globalization: the Key Concepts*, BERG, New York, 2007.